

ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
PADA PT. SELAPARANG FINANSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(2014-2018)

KARYADI, MUHAMAD
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani
Selong, Lombok Timur
Email : muhamadkaryadi01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh antara likuiditas dan aktivitas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT. Selaparang Finansial Kabupaten Lombok Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda serta statistic deskriptif dan asumsi klasik. Analisis data ini dilkakukan dengan menggunakan bantuan software aplikasi SPSS 21 Berdasarkan hasil penelitian dapat sebagai berikut :bahwa *current Ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($-1.972 < 2.5708$) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0.187 > 0,05$). *total assets turnover* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1.666 < 2.5708$) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0.238 > 0,05$). *total assets turnover* yang termasuk ke dalam rasio aktivitas dimana akan bisa mmepengaruhi tingkat kinerja perusahaan dengan menggunakan pengukuran ROE. Berdasarkan uji simultan diperoleh hasil f hitung sebesar 3.403. Karena nilai f hitung 3.403 lebih kecil dari nilai f tabel 5.05 dengan nilai Sig sebesar 0.227. Karena nilai signifikansi $0.227 > 0.05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f maka dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* (X_1) dan *Total Assets Turnover* (X_2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Return on Equity (Y_1).

Kata Kunci : *Current Ratio, Total Assets Turnover dan Return on Equity*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether there is an influence between liquidity and activities on the company's financial performance. This research was conducted at PT. Selaparang Financial East Lombok Regency. Analysis of the data used in this research is by using multiple linear regression analysis and descriptive statistics and classical assumptions. Analysis of this data is done using SPSS 21 application software. Based on the results of the study it can be as follows: that the current ratio is not significant negative effect on ROE because the value of t is smaller than t table ($-1.972 < 2.5708$) and the level of significance is less than 0.05 ($0.187 > 0.05$). total assets turnover has no significant positive effect on ROE because the t value is smaller than t table ($1,666 < 2.5708$) and the significance level is greater than 0.05 ($0.238 > 0.05$). total assets turnover which is included in the activity ratio which will be able to

influence the level of company performance by using ROE measurements. Based on the simultaneous test results obtained f count of 3,403. Because the calculated f value of 3,403 is smaller than the f value of table 5.05 with a Sig value of 0.227. Because the significance value of $0.227 > 0.05$ corresponds to the basis of decision making in the f test, it can be concluded that the Current Ratio (X1) and Total Assets Turnover (X2) simultaneously have no effect on Return on Equity (Y1).

Keywords : Current Ratio, Total Assets Turnover dan Return on Equity

PENDAHULUAN

Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya (Mentayani dkk, 2014: 31).

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalan dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013: 575

Table 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Jenis Penerimaan Di Kabupaten
Lombok Timur 2008-2017.

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | | Persentase |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Target | Realisasi | |
| 2008 | 42,016,545,975.00 | 34,904,413,611.26 | 83.07 |
| 2009 | 44,016,545,975.00 | 39,762,089,575.90 | 90.33 |
| 2010 | 43,874,724,630.00 | 39,468,850,188.00 | 89.96 |
| 2011 | 64,551,458,803.00 | 56,005,494,421.94 | 86.76 |
| 2012 | 87,430,162,709.00 | 88,327,952,783.15 | 101.03 |
| 2013 | 145,238,797,422.00 | 97,249,109,229.85 | 66.96 |
| 2014 | 205,518,244,665.00 | 180,308,182,148.09 | 87.73 |
| 2015 | 242,956,414,985.00 | 218,906,903,995.09 | 90.10 |
| 2016 | 253,015,629,929.00 | 236,147,475,250.90 | 93.33 |
| 2017 | 415,472,658,983.00 | 398,088,460,541.31 | 95.82 |

Sumber: Dinas BPKAD (Lombok Timur Dalam Angka, 2018)

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh data bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah PAD pada Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2008 -2017 selalu mengalami peningkatan tiap

tahunnya dengan kenaikan persentase yang cukup konsisten, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan rancangan anggaran sebelum perubahan dari PAD Kabupaten Lombok Timur sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan, pengoptimalkan serta pendistribusian PAD Kabupaten Lombok Timur belum maksimal sehingga selalu terjadi selisih angka dari target realisasi.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Timur
2008-2017.

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008 | 5,545,000,000.00 | 5,932,732,365.34 | 106.99 |
| 2009 | 5,545,000,000.00 | 6,732,003,350.00 | 91.19 |
| 2010 | 6,297,729,873.00 | 5,786,301,998.00 | 91.88 |
| 2011 | 6,727,500,000.00 | 7,749,518,087.00 | 115.19 |
| 2012 | 8,028,435,000.00 | 12,606,905,857.00 | 157 |
| 2013 | 12,043,000,000.00 | 15,095,125,584.00 | 125.34 |
| 2014 | 40,532,735,550.00 | 26,037,346,711.00 | 64.24 |
| 2015 | 40,602,735,550.00 | 33,035,050,805.00 | 81.36 |
| 2016 | 45,804,857,310.00 | 48,156,909,752.96 | 105.13 |
| 2017 | 56,463,655,525.00 | 61,020,187,603.00 | 108.07 |

Sumber: Dinas BPKAD (Lombok Timur Dalam Angka 2018)

Selain bersumber dari pajak daerah, pendapatan asli daerah juga dapat bersumber dari retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Resmi, 2014: 2). Dengan demikian, retribusi daerah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Di Kabupaten Lombok Timur
2008-2017.

| Tahun | Target | Realisasi | Presentase |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2008 | 19,499,375,185.00 | 17,824,451,144.00 | 91.41 |
| 2009 | 21,402,475,185.00 | 19,517,843,706.00 | 91.19 |
| 2010 | 20,566,362,185.00 | 19,186,252,067.00 | 93.29 |
| 2011 | 33,834,472,343.00 | 30,194,938,363.37 | 89.24 |
| 2012 | 31,533,495,343.00 | 25,450,882,558.00 | 80.71 |
| 2013 | 37,434,495,057.00 | 32,928,046,119.00 | 87.96 |
| 2014 | 43,072,924,229.00 | 24,999,408,079.00 | 58.04 |
| 2015 | 49,093,979,786.00 | 35,141,369,080.00 | 71.58 |
| 2016 | 52,557,750,562.00 | 32,032,656,104.00 | 60.95 |
| 2017 | 61,210,910,181.00 | 37,555,558,782.00 | 61.35 |

Sumber: Dinas BPKAD (Lombok Timur Dalam Angka 2018)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disaksikan bersama bahwa meski terbilang cukup konsisten dalam peningkatan retribusi daerah, namun tetap terjadi fruktuasi di dalamnya.

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah ini memberlakukan sistem *self assessment*, yang berarti wajib pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Sunarto dan Fatimah, 2016: 93). Jadi, retribusi daerah sangat berperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan di Kabupaten Lombok Timur ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 28 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yaitu : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri dan Rahayu, 2015: 281).

2.1.2 Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7). Hal ini dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

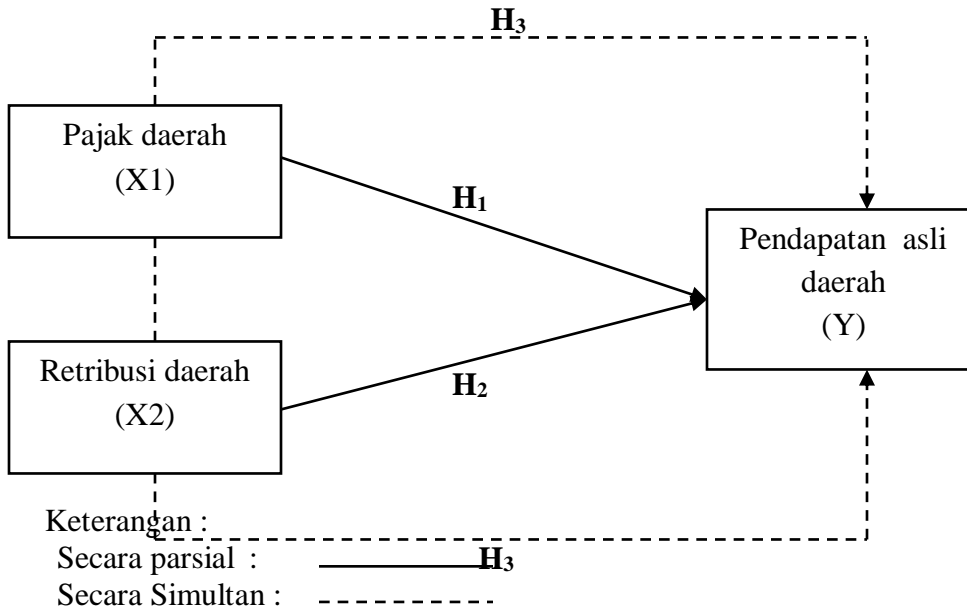
2.1.3 Retribusi Daerah

Secara umum, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 5).

2.3 Kerangka Konseptual

Keuangan daerah pada dasarnya meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam hal penerimaan daerah terdapat Pendapatan Asli Daerah yang dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Samudra (2015: 52) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan.

H1 :Pajak Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah.

H2 :RetribusiDaerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

3.1Klasifikasi Dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.1. Klasifikasi Variabel

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dirumuskan, maka variable-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel dependen sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau sebagai akibat, karena adanya variabel bebas (Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen juga dapat disebut sebagai variabel yang mendahului (antecedent variabel) dan dinamakan sebagai variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen. dalam bahasa Indonesia sering disebut juga variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah.

3.1.2 Definisi operasional variable penelitian

Berdasarkan klasifikasi variabel yang telah disebutkan, maka dapat diuraikan masing-masing definisi secara operasional variabel untuk menjelaskan arah penelitian yang dilakukan.

3.1.2.1 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Y. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunarto dan Fatimah, 2016: 95). Dalam hal ini pengukuran variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu diperoleh berdasarkan data data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah disusun dan dipublikasikan.

3.1.2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah factor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel dependen dalam penelitian ini meliputi :

1. Pajak daerah (X1)

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005: 1). Dalam penelitian ini, teknik pengukuran variabel pajak daerah adalah berdasarkan data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah disusun dan dipublikasikan.

2. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sunarto dan Fatimah, 2016: 95). Dalam penelitian ini, pengukuran variabel retribusi daerah diperoleh dari data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah disusun dan dipublikasikan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic (Indriantoro dan Supomo, 1999: 13).

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Lombok Timur. Jumlah populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur.

3.3.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Timur 2008-2017.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampelnya, agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti. Metode sampling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008: 122). Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terpublikasi selama 10 tahun terakhir dengan tujuan dapat diketahui perolehan pajak daerah dan retribusi daerah selama kurun waktu tersebut, yang selanjutnya dapat diketahui pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 10 tahun terakhir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Penelitian

Dalam uji hipotesis, data yang digunakan adalah data pajak daerah, retribusi daerah dan data PAD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Analisis Data Penelitian

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | PAD |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2008 | 5,932,732,365.34 | 17,824,451,144.00 | 34,904,413,611.26 |
| 2009 | 6,732,003,350.00 | 19,517,843,706.00 | 39,762,089,575.90 |
| 2010 | 5,786,301,998.00 | 19,186,252,067.00 | 39,468,850,188.00 |
| 2011 | 7,749,518,087.00 | 30,194,938,363.37 | 5,600,549,4421.94 |
| 2012 | 12,606,905,857.00 | 25,450,882,558.00 | 88,327,952,783.15 |
| 2013 | 15,095,125,584.00 | 32,928,046,119.00 | 97,249,109,299.85 |
| 2014 | 26,037,346,711.00 | 24,999,408,079.00 | 180,308,182,148.09 |
| 2015 | 33,035,050,805.00 | 35,141,369,080.00 | 218,906,903,995.09 |
| 2016 | 48,156,909,752.96 | 32,032,656,104.00 | 236,147,745,250.90 |
| 2017 | 61,020,187,603.00 | 37,555,558,782.00 | 398,008,460,541.31 |
| Jumlah | 222,152,082,113.30 | 274,831,406,002.37 | 1,389,089,201,815.49 |

Sumber : Data sekunder diolah

4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana perubahan variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel terikat. Adapun hasil pengujian regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut

Tabel 4.2
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -1.914E10 | 4.080E10 | | -.469 | .653 |
| Pajak Daerah | 5.616 | .659 | .926 | 8.524 | .000 |
| Retribusi Daerah | 1.211 | 1.814 | .073 | .668 | .526 |

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: hasil output spss

Hasil pengolahan SPSS dapat ditunjukkan melalui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1.91410 + 5.616X_1 + 1.211X_2$$

Dari hasil uji regresi linier berganda dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh adalah -1.914. Hal ini berarti bahwa apabila nilai variabel bebas sama dengan nol, maka besarnya variabel terikat adalah -1.914.

2. Koefisien regresi $\beta_1 X_1$ Pajak Daerah

Besarnya koefisien regresi variabel pajak daerah (X_1) adalah 5.616 dan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel pajak daerah akan meningkatkan variabel tingkat PAD sebesar 5.616 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah tetap.

3. Koefisien regresi $\beta_2 X_2$ Retribusi Daerah

Besarnya koefisien regresi variabel retribusi daerah (X_2) adalah 1.211 dan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Hal ini berarti setiap peningkatan variabel pajak daerah akan meningkatkan variabel PAD sebesar 1.211 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah tetap.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan uji normalitas terhadap pajak daerah, pajak retribusi dan PAD diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 10 |
| Normal Parameters ^a | Mean | -.0000370 |
| | Std. Deviation | 2.24078136E |
| | | 10 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .256 |
| | Positive | .128 |
| | Negative | -.256 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .810 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .528 |

a. Test distribution is Normal.

Dari data yang diperoleh selama 10 tahun terakhir atau terdapat 10 sampel yang digunakan, memiliki nilai signifikansi 0,528 yang dapat dilihat dalam kolom Asymp.Sig. (2-tailed). Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila uji normalitas yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 (Sig > 0,05). Nilai signifikan dari hasil uji normalitas untuk data mengenai PAD yaitu lebih dari 0,05 (0,528 < 0,05) maka dapat disimpulkan data data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian uji hipotesis akan dilakukan yaitu dengan analisis regresi linear berganda.

4.2.2.2 Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada penelitian ini untuk mengujian ada atau tidaknya multikoleniaritas di dalam model regresi adalah dengan melihat angka Tolerance diatas (>) 0,1 melihat nilai VIF di bawah (<) 10.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|------|-------------------------|-----|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------|------|-------|------|------|-------|
| 1 | (Constant) | -1.914E10 | 4.080E10 | | -.469 | .653 | | |
| | Pajak Daerah | 5.616 | .659 | .926 | 8.524 | .000 | .433 | 2.312 |
| | Retribusi Daerah | 1.211 | 1.814 | .073 | .668 | .526 | .433 | 2.312 |

a. Dependent Variable:

Berdasarkan tabel output “coefficients” pada bagian “Collinearity Statistics” diketahui nilai Tolerance untuk variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) adalah 0,433 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) adalah $2,312 < 10,00$. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Autokolerasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah antara variabel terikat dan variabel bebas saling mempengaruhi.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .982 ^a | .964 | .954 | 2.541E10 | 2.769 |

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: hasil output spss

Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson atas residual persamaan regresi diperoleh angka t-hitung sebesar 2.769. Sebagai pedoman umum Durbin-Watson berkisar 0 dan 4. Jika nilai uji statistik Durbin-Watson lebih kecil dari satu atau lebih besar dari tiga, maka residual atau eror dari model regresi berganda tidak bersifat independen atau terjadi autokorelasi. Jadi berdasarkan nilai uji statistik Durbin-Watson dalam penelitian ini berada diatas satu dan dibawah tiga (2.769) sehingga tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Uji Statistik

4.2.3.1 Uji t (Parsial)

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua maka dilakukan uji t yaitu untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Pada penelitian ini kriteria dalam melakukan uji t adalah jika t hitung > t tabel, maka artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan

variabel terikat. Jika t hitung $<$ t tabel, maka artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Untuk menentukan t tabel adalah yang pertama dengan menentukan tingkat kepercayaan (α) dibagi dua karena pada uji t melakukan pengujian dua arah.

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -1.914E10 | 4.080E10 | | -.469 | .653 |
| | Pajak Daerah | 5.616 | .659 | .926 | 8.524 | .000 |
| | Retribusi Daerah | 1.211 | 1.814 | .073 | .668 | .526 |

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: hasil output spss

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa pada model tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD.

Ha₁: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil statistik uji-t dengan nilai t hitung sebesar 8,524. t tabel dicari pada signifikansi 0,025 dengan *degree of freedom*= $n-k-1$ atau $10-2-1=7$ hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,365 ($8,524 > 2,365$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,025$). Maka H_{01} ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD.

Ha₁: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil statistik uji-t dengan nilai t hitung sebesar 0,668. t tabel dicari pada signifikansi 0,025 dengan *degree of freedom*= $n-k-1$ atau $10-2-1=7$ hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,365 ($0,668 < 2,365$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,526 ($0,526 > 0,025$). Maka H_{01} diterimakan dan H_{a1} ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4.2.3.2 Uji F (Simultan)

Untuk menguji hipotesis selanjutnya maka dilakukan uji F (simultan) yaitu untuk menguji pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) secara keseluruhan atau simultan terhadap variabel (Y). Cara melihat hasil dari uji F ini adalah Apabila F hitung $>$ F tabel, maka berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat namun jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8

Hasil Uji F (Simultan) Taraf Signifikan 5%

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 1.219E23 | 2 | 6.094E22 | 94.401 | .000 ^a |
| | Residual | 4.519E21 | 7 | 6.456E20 | | |
| | Total | 1.264E23 | 9 | | | |

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai df pembilang (N1) adalah 2 dan df penyebut (N2) adalah 7. Nilai N1 juga dapat dihitung dengan rumus $3 - 1 = 2$ dan N2 dapat dihitung dengan rumus $10 - 3 = 7$. Hal ini menyatakan bahwa F tabel terdapat pada kolom 2 pada df pembilang dan kolom 7 pada df penyebut yaitu sebesar 4,74.

Melihat nilai F hitung dan F tabel pada penelitian ini. Maka dapat dilihat bahwa F hitung memiliki nilai lebih besar dari F tabel yaitu $94,401 > 4,74$. Nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,025$) Hal ini menyatakan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat PAD.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017.

Berdasarkan hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($8,524 > 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil ($0,000 < 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dimana tinggi rendahnya tingkat penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Begitu pula dengan penelitian Sunarto Dan Fatimah (2016) menemukan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sama halnya dengan penelitian Putrid dan Rahayu (2015) menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Sejalan juga dengan penelitian Marita dan Suardana (2016) yang menemukan realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

4.3.1.1 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017

Berdasarkan Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,668 < 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih besar ($0,526 > 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap PAD. Artinya tinggi rendah tingkat Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Berbeda pula dengan penelitian Sunarto Dan

Fatimah (2016) menemukan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Lain halnya dengan penelitian Putrid dan Rahayu (2015) menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD. Tidak sejalan juga dengan penelitian Marita dan Suardana (2016) yang menemukan realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

4.3.1.3 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Terhadap PAD Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $94,401 > 4,74$. Hal ini menyatakan bahwa variabel pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah dan pengalokasian retribusi daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka dapat diberikan kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($8,524 > 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil ($0,000 < 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dimana tinggi rendahnya tingkat penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Berdasarkan Nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,668 < 2,365$) dengan tingkat signifikansi lebih besar ($0,526 > 0,025$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Artinya tinggi rendah tingkat Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) yang menemukan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $94,401 > 4,74$. Hal ini menyatakan bahwa variabel pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah dan pengalokasian retribusi daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahwa pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Obyek penelitian ini hanya terbatas pada satu kabupaten masih ada tingkatan daerah lainnya seperti pemerintah provinsi.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Lombok timur harus melakukan sosialisasi terkait pembayaran iuran baik itu pajak daerah dan retribusi daerah atau berbagai sumber pendapatan daerah lainnya yang nantinya mampu mempengaruhi pendapatan asli daerah bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan digiatkan lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya iuran untuk membangun kesejahteraan bersama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan variabel dependen dependen secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah,2018. *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2018*
- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Ed. Ke-8). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N., & Supomo. (1999). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*(Ed. Ke-1). Yogyakarta: BPFE.
- Marita, N.M., dan Suardana, K. A. (2016). Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar. *E-jurnal akuntansi universitas udayana*. 1(14).53-65.
- Mardiasmo.(2001). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. .
- Prakosa, K. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Ed. Revisi). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Prawoto, A. (2011). *Pengantar keuangan publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : teori dan kasus* (Ed. Ke-8). Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, R. D. (2015). Analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Citra ekonomika jurnal ekonomi*.1(9).23-36.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Suriadinata.(2003), *Kajian tentang keuangan daerah*. Jakarta. PT Gramedia Utama

Undang-undang Republik Indonesia.(2000).Undang-undang RI No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang-undang Republik Indonesia.(2009).Undang-undang RI No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Undang-undang Republik Indonesia.(2004).Undang-undang RI No.33 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah.